

Politik Uang Dalam Dinamika Sosial Di Sumatera Barat Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah

Eka Vidya Putra

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: ekavidya@fis.unp.ac.id

Reno Fernandes

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: renofernandes@fis.unp.ac.id

Haldi Patra

Universitas Negeri Padang, Indonesia

email: hpatra@fis.unp.ac.id

Abrar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol

email: abrarbroer08@gmail.com

Dikirim: 6-8-2024; Direvisi: 25-11-2024; Diterima: 5-12-2024

ABSTRACT

This study aimed to explore the relationship between money politics and regional political in the context of changing social dynamics in West Sumatra, an area traditionally and religiously known for the philosophy of “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

This study used a survey method with a qualitative and quantitative analysis approach. Data were collected through a survey of 430 respondents in West Sumatra obtained through multiple random sampling and in-depth interviews with various stakeholders, including politicians, academics, and the general public.

The results showed that although the majority of West Sumatran people still uphold customary and religious values, rapid social and economic changes had influenced their perceptions of money politics. These findings indicated an increasing acceptance of money politics as a strategy to achieved political power, which had implications for political resilience in West Sumatra. This study highlighted the importance of strengthening political education and democratic values that were in line with local traditions to maintained the integrity of the democratic process in West Sumatra.

Keywords: *Money Politics, Social Dynamics, West Sumatra, Regional Political Resilience*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara politik uang dan ketahanan politik wilayah dalam konteks dinamika sosial yang berubah di Sumatera Barat, sebuah daerah yang secara tradisional dan religius dikenal dengan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 430 responden di Sumatera Barat yang didapatkan melalui multiple random sampling dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk politisi, akademisi, dan masyarakat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas masyarakat Sumatera Barat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat telah mempengaruhi persepsi mereka terhadap politik uang. Temuan ini mengindikasikan adanya peningkatan penerimaan terhadap politik uang sebagai strategi untuk mencapai kekuasaan politik, yang berimplikasi pada ketahanan politik di Sumatera Barat. Penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi yang selaras dengan tradisi lokal untuk menjaga integritas proses demokrasi di Sumatera Barat.

Kata kunci: *Politik Uang, Dinamika Sosial, Sumatera Bara, Ketahanan (Demokrasi) Politik Wilayah*

PENGANTAR

Politik uang yang merujuk pada penggunaan sumber daya finansial untuk mempengaruhi proses politik dan pemilihan telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia (Aspinall dan Sukmajati, 2016). Fenomena ini sering mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi karena kandidat yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang lebih besar cenderung lebih mudah memenangkan pemilihan, meskipun mereka mungkin tidak memiliki kapabilitas atau integritas yang diperlukan untuk memimpin (Hamson, 2021; Muhtadi dkk., 2020a; Schaffer, 2007). Di Indonesia, praktik politik uang tidak hanya mencakup pemberian uang tunai kepada pemilih, tetapi juga sering melibatkan pemberian barang atau jasa lainnya sebagai bentuk imbalan untuk mendapatkan dukungan suara (Törnquist, 2006).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Ufen (2006) mengungkapkan bahwa politik uang sering terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan di antara pemilih yang memiliki pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya memperburuk ketimpangan ekonomi tetapi juga berpotensi memperdalam disparitas

sosial. Lebih jauh, politik uang juga dapat menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan bagi pembangunan institusi politik yang sehat. Ketika pejabat terpilih lebih berfokus pada pengembalian investasi mereka dalam bentuk suap dan politik uang, kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum sering terabaikan (Aspinall dan Sukmajati, 2016). Akibatnya, politik uang bukan hanya menjadi hambatan bagi demokrasi yang berkualitas tetapi juga bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Di Sumatera Barat, sebuah provinsi yang terkenal dengan kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang dirangkum dalam falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (Abdullah, 1981; Amir, 1997; Djamaris, 2004; Madjoindo, 1956), politik uang mengundang perhatian khusus mengingat potensi dampaknya terhadap ketahanan politik lokal. Tradisi adat dan agama yang menjadi landasan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat menciptakan harapan bahwa proses politik akan dijalankan dengan integritas dan kejujuran yang tinggi. Realitas di lapangan sering menunjukkan sebaliknya. Praktik politik uang di Sumatera Barat tidak hanya mencederai nilai-nilai adat dan agama, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Menurut

penelitian yang dilakukan oleh Buehler (2003), peningkatan praktik politik uang di wilayah ini menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai moral yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Penggunaan uang sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik bertentangan dengan prinsip-prinsip “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang menekankan pada keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik.

Untuk masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan nilai-nilai religius, perubahan dinamika sosial dan ekonomi membawa tantangan tersendiri (Buehler, 2003). Percepatan urbanisasi, peningkatan akses informasi, dan perubahan struktur ekonomi telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku politik masyarakat Sumatera Barat. Meski nilai-nilai tradisional masih dipegang teguh, ada indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai menunjukkan penerimaan terhadap praktik politik uang sebagai cara yang dapat diterima untuk mencapai kekuasaan politik (Sugiharto, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan menghambat partisipasi politik yang sehat (Anggraini, 2019; Muhtadi dkk., 2020b; Sjafrina, 2019; Widiastanto dkk., 2021). Di Sumatera Barat, implikasi politik uang terhadap ketahanan politik menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dinamika sosial yang berubah (Misra dkk., 2021). Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana perubahan sosial ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik uang dan bagaimana hal ini berdampak pada ketahanan demokrasi politik di daerah yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan agama.

Sebagai provinsi yang dikenal kuat dengan nilai adat dan agamanya yang tertuang dalam pepatah adat “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara politik uang dan ketahanan politik dalam konteks perubahan sosial di Sumatera Barat. Dalam artikel ini peneliti menemukan suatu fenomena paradoks, yaitu meskipun mayoritas masyarakat menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, namun karena tekanan persaingan politik praktis dan kebutuhan untuk memobilisasi dukungan secara cepat, politik uang merupakan fenomena yang signifikan di Sumatera Barat dan dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan kandidat dalam pemilu.

Untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara teoritis peneliti menggunakan Teori Klientelisme untuk menjelaskan hubungan simbiosis antara dua aktor utama dalam politik (Aspinall dan Berenschot, 2019). Secara politik, patron menyediakan keuntungan material atau jasa kepada klien dengan imbalan dukungan politik, biasanya dalam bentuk suara dalam pemilihan umum. Hubungan ini tidak bersifat timbal balik setara, melainkan merupakan hubungan hierarkis dimana klien menjadi bergantung pada patron untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya, seperti pekerjaan, uang, atau bantuan sosial. Ini sangat berhubungan dengan struktur sosial yang ada, khususnya dalam masyarakat yang memiliki hierarki sosial yang kuat, seperti yang sering terjadi di wilayah pedesaan atau daerah yang memiliki ketergantungan tinggi pada tokoh adat atau agama. Tokoh-tokoh tersebut berfungsi sebagai *broker* atau

perantara antara patron dan klien, membantu patron untuk mendistribusikan bantuan material dan mengarahkan klien untuk memberikan dukungan politik. Menurut Robinson dan Verdier (2013), klientalisme berkembang di negara-negara dimana negara tidak mampu menyediakan layanan publik yang memadai. Di tempat-tempat seperti ini, bantuan langsung dari patron menjadi sumber penting bagi banyak warga, sehingga mereka merasa terikat secara politis kepada patron yang memberikan mereka akses terhadap layanan atau kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi oleh negara. Dalam sistem ini, politik menjadi lebih personal dan informal, berfokus pada pertukaran langsung antara patron dan klien, daripada proses politik yang lebih terstruktur dan berbasis kebijakan.

Klientalisme telah menjadi bagian dari dinamika politik di banyak wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Di wilayah ini, hubungan patron-klien sering kali dimediasi melalui jaringan sosial dan budaya yang kuat, seperti hubungan dengan tokoh adat atau agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Tokoh adat atau agama ini sering bertindak sebagai perantara antara calon politisi dan masyarakat pemilih, mengarahkan masyarakat untuk mendukung kandidat tertentu dengan imbalan manfaat material atau simbolis. Banyak kasus menunjukkan bahwa politik uang di Sumatera Barat terwujud dalam bentuk pemberian bantuan langsung kepada masyarakat melalui tokoh adat, ulama, atau pemimpin komunitas setempat. Bantuan ini bisa berbentuk uang tunai, sembako, bantuan sosial, atau proyek infrastruktur kecil yang didanai secara pribadi oleh kandidat. Hal ini memungkinkan patron untuk mempertahankan kendali politik di suatu daerah, terutama di komunitas-komunitas yang lebih terpencil

atau miskin, di mana masyarakat sangat bergantung pada bantuan dari luar.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall dan Sukmajati (2016), praktik klientalisme di Indonesia tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga selama masa jabatan pejabat terpilih, dimana mereka terus menggunakan akses mereka terhadap sumber daya negara untuk memelihara hubungan patron-klien dengan masyarakat. Di Sumatera Barat, khususnya, hubungan ini dipertahankan melalui program-program bantuan yang didistribusikan melalui jaringan sosial, seperti keluarga besar, suku, atau kelompok agama.

Selanjutnya teori ketahanan politik atau *Political Resilience Theory* akan membantu untuk menjelaskan kemampuan sistem politik untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat internal seperti korupsi, konflik politik, atau ketidakadilan sosial, maupun ancaman eksternal seperti intervensi asing, perubahan lingkungan ekonomi global, atau ancaman militer. Ketahanan politik tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik atau militer negara, tetapi lebih pada kekuatan institusi, kualitas demokrasi, transparansi, serta keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Artikel ini berfokus pada Sumatera Barat, sebuah provinsi di Indonesia yang dikenal dengan kuatnya nilai-nilai adat dan agama. Sumatera Barat memiliki falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" (adat bersumber dari syariat, syariat bersumber dari Al-Qur'an). Setting ini memberikan konteks unik untuk mengeksplorasi bagaimana politik uang dipersepsikan dan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi ketahanan politik di daerah ini.

Analisis dalam artikel ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode kualitatif dan

kuantitatif (Creswell, 2013; Creswell, 2017; McNabb, 2020). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap politik uang dan bagaimana perubahan dinamika sosial mempengaruhi ketahanan politik di wilayah ini.

Sebuah survei kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan-hubungan antar variabel yang dipelajari. Survei ini menggunakan masyarakat Sumatera Barat yang memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Jumlah Pemilih Tetap berdasarkan dari data KPU Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 4.088.606 orang. Sementara sampel, populasi dari survei ini adalah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 18 dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Daftar populasi dapat diakses secara daring dari <https://cekdptonline.kpu.go.id>. Peneliti mengakui bahwa ada satu daerah yang luput dalam pengumpulan data yang peneliti lakukan, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai karena keterbatasan sumber daya yang tersedia dalam melakukan studi ini.

Cara untuk menghitung sampel ini menggunakan satu rumus dalam statistika inferensial yang berasal dari teori sampling (Cochran, 1991; Sumargo, 2020). Sampel dari survei ini adalah populasi terpilih sebanyak 430 responden dengan menggunakan rumus Cochran yang dirancang untuk menghitung ukuran sampel dengan tingkat kepercayaan tertentu dan *margin of error* yang diinginkan. Jumlah tersebut memiliki toleransi kesalahan (*margin of error*) $\pm 5\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan populasi dan *margin error* 5% pada tingkat kepercayaan itu, jumlah sampel yang tepat seharusnya sekitar 384. Namun, angka sampel 430 adalah pilihan yang konservatif dan memastikan hasil yang lebih akurat dengan margin kesalahan

yang lebih kecil. Metode pengacakan, *multistage sampling*. kuesioner yang terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka yang dirancang untuk mengukur persepsi terhadap politik uang, kepercayaan terhadap demokrasi, dan nilai-nilai adat serta agama.

Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan *focus group discussions* (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk politisi, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat umum. Metode ini digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana politik uang dipersepsikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya Sumatera Barat. Wawancara mendalam dilakukan dengan 20 informan kunci yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial di Sumatera Barat. Mereka terdiri dari politisi, anggota partai politik, tim sukses dari kandidat yang maju dalam pemilihan, masyarakat umum, pengamat dan wartawan.

Data survei dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti. Sementara data wawancara dan FGD dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari diskusi.

Berdasar survei yang dilakukan, peneliti dapat menunjukkan hasil survei tersebut sebagai berikut.

Pertama, dinamika sosial dan politik uang. Sumatera Barat dengan nilai-nilai adatnya yang dikenal melalui konsep “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”

(ABS-SBK), memiliki dinamika sosial yang khas. Nilai-nilai kearifan lokal ini membentuk hubungan antara masyarakat dan pemimpinnya, di mana tokoh-tokoh adat, agama, dan keluarga besar memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan politik. Pada sisi lain, karena budaya patronase yang masih kuat, para elit politik cenderung memanfaatkan hubungan-hubungan sosial ini untuk memperoleh dukungan.

Politik uang sering disamakan sebagai bentuk sumbangan adat atau “uang sekapur sirih” di berbagai daerah, termasuk Sumatera Barat. Praktik ini memberikan legitimasi kultural pada pemberian uang atau barang dalam konteks pemilihan, sehingga sulit diberantas secara efektif oleh regulasi formal. Namun, fenomena ini juga menunjukkan paradoks. Di satu sisi, masyarakat Sumatera Barat dikenal memiliki kesadaran politik yang tinggi dan cenderung mendukung calon-calon yang diharapkan membawa perubahan. Di sisi lain, kemiskinan struktural dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah membuat banyak pemilih rentan terhadap bujukan politik uang.

Di satu sisi, terdapat optimisme yang cukup besar terhadap perbaikan dan transformasi di kalangan penduduk Sumatera Barat, yang dibuktikan dengan kesadaran politik mereka yang relatif tinggi. Namun, ketergantungan ekonomi yang mendalam dan kemiskinan struktural yang mengakar menjadi hambatan yang signifikan terhadap upaya yang bertujuan untuk memberantas praktik politik uang. Individu yang bercita-cita untuk memberikan suara yang terinformasi, dipandu oleh visi dan program kandidat yang lebih terpuji, sering kali dipaksa untuk membuat keputusan elektoral yang dipengaruhi oleh insentif material yang menawarkan kepuasan langsung.

Fenomena ini menjelaskan sebuah paradoks dalam proses demokrasi di Indonesia, dimana sistem politik seolah-olah menekankan pemilihan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak kandidat. Namun, praktik politik uang yang mengakar secara budaya merusak aktualisasi pemilihan yang adil dan transparan. Dampak politik uang sangat membahayakan integritas demokrasi, menjadikannya lebih merupakan masalah keterlibatan transaksional daripada keputusan yang didasarkan pada ide-ide otentik dan program pembangunan.

Kedua, implikasi politik uang terhadap ketahanan politik wilayah. Ketahanan politik suatu wilayah merujuk pada kemampuan sistem politik dalam menghadapi berbagai tekanan baik dari internal maupun eksternal. Dalam konteks politik uang di Sumatera Barat, implikasinya terhadap ketahanan politik sangat signifikan. Menurut teori ketahanan politik, keberlanjutan politik bergantung pada legitimasi yang dibangun dari kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil (Arief, 2010; Fuad, 2015).

Politik uang cenderung merusak legitimasi tersebut. Hal ini tercermin dalam melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik dan pemimpin yang terpilih melalui praktik-praktik curang. Di Sumatera Barat, politik uang tidak hanya mengganggu proses pemilihan yang seharusnya demokratis, tetapi juga memicu korupsi setelah pemilu. Calon yang terpilih dengan modal politik uang lebih cenderung terlibat dalam korupsi untuk mengembalikan biaya kampanye mereka (Mietzner, 2015).

Selain itu, politik uang juga memicu ketidakstabilan politik jangka panjang. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang dianggap hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, mereka cenderung menjadi

apatis. Fenomena ini mengurangi partisipasi politik aktif, yang merupakan salah satu pilar ketahanan politik wilayah. Di Sumatera Barat, hal ini dapat memperlemah kekuatan politik adat yang sebelumnya menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas politik lokal.

Survei yang dilakukan terhadap 430 responden di Sumatera Barat mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat setuju bahwa uang merupakan faktor penting dalam politik, sebagaimana terinci dalam Tabel 1. Sebanyak 53,95% responden setuju bahwa uang adalah penentu orang maju ke dunia politik, sementara 16,51% tidak setuju, 15,12% ragu, 11,86% tidak tahu, dan 2,56% tidak menjawab. Hal ini diperkuat melalui wawancara yang dilakukan

kepada M. (24) yang menjawab bahwa modal berupa materi merupakan syarat yang penting untuk dimiliki oleh seseorang apabila ia ingin berkarir sebagai politisi.

“...ya, tentunya mereka harus punya modal, memiliki karakter dan pintar. Kalau tidak punya modal tentunya seseorang sulit untuk bisa berkegiatan dalam politik.”

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa persepsi terhadap politik uang bervariasi berdasarkan faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan wilayah geografis, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2. Responden yang lebih tua cenderung lebih skeptis terhadap politik uang dibandingkan

Tabel 1
Persepsi Masyarakat Sumbar Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024

Pernyataan	Setuju	Ragu	Tidak Setuju	Tidak tahu	Tidak menjawab
Anggota Dewan yang terpilih/ mendapatkan suara yang terbanyak sebahagian besar melakukan politik uang/ serangan fajar/ pembagian sembako	43,49%	24,42%	15,12%	14,42%	2,56%
Masyarakat/ pemilih sebahagian besar akan mencoblos calon yang memberikan uang/ sembako dari pada memperhatikan visi, janji, program dari si calon	38,14%	24,65%	19,77%	14,65%	2,79%
Aparat pemerintahan, seperti Bupati/walikota/ walinagari/ wali jorong terlibat mengarahkan masyarakat/ pemilih untuk memilih satu calon/ partai tertentu	30,70%	27,44%	21,63%	17,44%	2,79%
Kampanye berbentuk hiburan lebih disukai dari pada dialog	48,14%	21,40%	14,42%	13,49%	2,56%
Uang menjadi faktor terpenting seseorang maju/terlibat dalam politik	53,95%	16,51%	15,12%	11,86%	2,56%

Sumber: Laporan survei preferensi politik masyarakat Sumatera Barat Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Naskah tidak dipublikasikan)

Tabel 2
Persepsi Masyarakat Sumbar Terhadap Pelaksanaan Pemilu 2024

Pernyataan	Percaya	Ragu	Tidak Percaya	Tidak tahu	Tidak menjawab
Jujur dan adil	60,93%	22,79%	9,53%	6,28%	0,47%
Bebas dan rahasia	65,58%	19,30%	8,60%	6,05%	0,47%
Tanpa politik uang	32,09%	31,40%	24,42%	11,63%	0,47%
Tanpa kampanye hitam	32,09%	29,77%	20,70%	16,74%	0,70%
Tanpa pemberian sembako	34,42%	28,14%	24,65%	12,09%	0,70%
Tanpa manipulasi perolehan suara	43,49%	28,37%	15,58%	11,40%	1,16%
Tanpa ada kecurangan di TPS	51,86%	23,49%	14,19%	8,84%	1,63%
Tanpa pemberitaan hoax	34,42%	28,14%	18,84%	16,74%	1,86%
PNS yang netral	41,63%	25,35%	21,16%	10,23%	1,63%
Penyelenggara Pemilu yang jujur (berintegritas)	53,72%	22,33%	13,49%	9,07%	1,40%

Sumber: Laporan survei preferensi politik masyarakat Sumatera Barat Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Naskah tidak dipublikasikan)

dengan responden yang lebih muda. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi persepsi; responden dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih kritis terhadap praktik politik uang. Responden yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai perubahan politik dari masa ke masa. Mereka sering melihat praktik politik uang sebagai bentuk degradasi moral dan penurunan integritas politik. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia ini lebih menyadari dampak negatif politik uang terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemimpin politik (Schaffer, 2007).

Responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan untuk lebih kritis terhadap praktik politik uang. Pendidikan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip demokrasi dan pentingnya integritas dalam proses politik. Mereka cenderung menyadari bahwa politik uang dapat merusak fondasi demokrasi dan menciptakan siklus ketergantungan antara pemilih dan politisi yang tidak sehat (Aspinall dan Sukmajati, 2016). Sebaliknya, responden dengan pendidikan yang lebih rendah mungkin melihat politik uang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, meskipun mereka juga memahami bahwa praktik ini tidak ideal.

Berdasarkan kerangka teoritis ini, politik uang berfungsi sebagai ancaman terhadap ketahanan politik karena memperkuat sistem patronase yang merusak integritas demokrasi. Di Sumatera Barat, politik uang mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu, yang kemudian memperlemah partisipasi aktif dalam politik, sehingga menurunkan ketahanan politik wilayah. Sistem patron-klien yang terbentuk melalui politik uang juga

mengganggu mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan, karena para pemimpin lebih cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok pendukung mereka dibandingkan kepentingan publik yang lebih luas (Muhtadi, 2013 dan 2019).

Untuk meningkatkan ketahanan politik, penting untuk memberantas praktik politik uang melalui peningkatan kesadaran politik masyarakat, reformasi hukum yang lebih kuat, dan penguatan peran institusi adat dalam menjaga integritas politik lokal. Dengan demikian, politik uang sebagai bagian dari dinamika sosial di Sumatera Barat dapat dikurangi dan ketahanan politik wilayah dapat terjaga. Persepsi terhadap politik uang juga bervariasi berdasarkan wilayah geografis. Persepsi terhadap politik uang juga bervariasi berdasarkan wilayah geografis, karena faktor budaya, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah. Di beberapa daerah, politik uang mungkin dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses pemilihan, sementara di daerah lain, praktik ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal sangat penting dalam merumuskan kebijakan anti-politik uang. Pendidikan politik yang berkelanjutan, terutama di daerah yang masih rawan praktik politik uang, dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap integritas dalam berpolitik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum, serta transparansi dalam pendanaan kampanye politik, merupakan langkah penting untuk menciptakan iklim politik yang lebih bersih dan berkeadilan.

Di daerah perkotaan, dimana akses terhadap informasi dan pendidikan lebih tinggi, terdapat kesadaran yang lebih besar

tentang dampak negatif politik uang (Geys, 2006). Sementara itu, di daerah pedesaan, politik uang mungkin lebih diterima sebagai bagian dari tradisi pemilihan, terutama jika akses terhadap sumber daya ekonomi terbatas. Penelitian Buehler (2003) menunjukkan bahwa praktik politik uang lebih umum di daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dimana pemilih mungkin merasa terpaksa menerima uang atau barang dari kandidat sebagai kompensasi untuk dukungan politik mereka. Dalam wawancara yang dilakukan, terdapat semacam ancaman bahwa jika tidak memberikan dukungan politik, maka sumber daya yang sebelumnya atau dijanjikan akan disalurkan kepada mereka tidak diberikan. Masyarakat kecil yang tidak memiliki posisi tawar yang kuat serta kemandirian ekonomi kemudian terpaksa untuk memberikan dukungan politik mereka pada pihak-pihak tersebut.

Selain itu, satu fenomena yang menarik dan membutuhkan analisis yang lebih mendalam namun sayangnya bukan menjadi fokus utama dalam diskusi ini adalah kemunculan tawaran hiburan seperti konser musik yang dinilai sebagai cara kampanye yang efektif dalam mengumpulkan massa. Hal ini tentu saja mengingatkan seseorang dengan bagaimana Orde Baru yang menerapkan strategi *floating mass* dan mensponsori konser-konser musik dalam masa-masa kampanye (Reeve, 2013; Ricklefs, 2008). Indonesia secara umum dan Sumatera Barat secara khususnya, menyaksikan bagaimana konser-konser tersebut digunakan oleh para kandidat untuk berkampanye, dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap hiburan dan porsi yang kecil untuk penyampaian gagasan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh responden hampir separuhnya (48%)

menyukai hiburan daripada dialog sebagai sarana untuk berkampanye (lihat Tabel 1). Namun, khusus di Sumatera Barat, pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran yang lebih banyak mengadakan kegiatan ini justru mendapatkan suara yang lebih sedikit dibandingkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Kompas, 2024). Tentu saja, variabel ini tidak bisa menjelaskan faktor-faktor kemenangan Anies-Baswedan, namun fenomena ini patut untuk dianalisis lebih jauh, karena ia telah memberikan tren baru bagi bagaimana melaksanakan kampanye yang disukai oleh masyarakat.

Wawancara mendalam dan *Focus Group Discussions* (FGDs) dengan berbagai pemangku kepentingan mengungkapkan pandangan yang kompleks dan beragam tentang politik uang. Informan kunci, termasuk politisi, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat umum, mengakui adanya praktik politik uang dalam pemilu. Namun permasalahannya sulit untuk membuktikannya karena, setiap pihak yang mencoba untuk melaporkannya akan kesulitan untuk menemukan saksi-saksi yang mau untuk memberikan keterangannya kepada pihak yang berwenang (Lihat Gambar 1).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa politik uang sering dianggap sebagai “bagian dari permainan” dalam politik lokal. Mereka mencatat bahwa dalam konteks persaingan politik yang ketat, kandidat sering merasa terpaksa menggunakan uang untuk memperoleh dukungan. Dalam pandangan mereka, tanpa menggunakan politik uang, sulit bagi seorang kandidat untuk mendapatkan suara yang cukup untuk memenangkan pemilihan, terutama ketika berhadapan dengan lawan yang juga menggunakan taktik yang sama. Salah seorang tokoh politik lokal di suatu kabupaten di Sumatera Barat

Gambar 1
Program Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Yang Diingat Masyarakat



Sumber: Laporan Survei preferensi politik masyarakat Sumatera Barat Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Naskah tidak dipublikasikan)

menyatakan bahwa, ia hampir saja tidak mendapatkan kursi pada pemilihan anggota legislatif (DPRD) kabupaten pada 2024 yang lalu. Meskipun merasa sudah bekerja dengan baik dengan masyarakat dan merasa cukup percaya diri karena adalah seorang petahana, namun pada penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh KPU, ia hanya terpaut beberapa puluh suara saja dari seseorang kandidat baru yang diketahuinya banyak memberikan ‘sumbangan’ kepada para pemilih.

Hal tersebut menciptakan siklus dimana politik uang menjadi praktik yang normal dan bahkan diperlukan dalam politik lokal (Begouvic dan Cuan, 2021). Salah seorang narasumber yang berlatar belakang akademisi HI (49) mengungkapkan bahwa;

“... sekarang sekarang tergantung siapa yang punya modal paling besar. Setiap kali kita mengajak politis untuk berdiskusi, jarang mereka yang datang. Tentu kita berharap ketika kita memanggil mereka, kita bisa membongkar isi pikiran mereka untuk didengarkan oleh masyarakat. Ujung-

ujungnya sekarang ini bukan lagi masalah kualitas. Saya merasa mengapa orang kok malas untuk mengadu pikiran.”

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa politik uang merusak moralitas politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Mereka menyoroti bahwa praktik ini tidak hanya mencederai nilai-nilai etika, tetapi juga merusak prinsip keadilan dan kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam proses pemilihan. Informan dari kalangan akademisi dan tokoh adat menekankan bahwa politik uang bertentangan dengan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, yang mengajarkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk politik. Selain itu, diskusi dengan masyarakat umum mengungkapkan bahwa meskipun beberapa pemilih menerima uang atau barang dari kandidat, mereka melakukannya bukan karena mereka mendukung praktik tersebut, tetapi lebih karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Seorang narasumber R (43) mengungkapkan pengalamannya setiap pemilu akan dilaksanakan;

“Sering saya menerima amplop (untuk memilih) dari seorang kandidat. Bahkan terkadang lebih dari satu kandidat, dua, bahkan tiga. Jumlah bervariasi. Tapi saya pribadi dan beberapa kawan-kawan yang lain pada akhirnya tetap memilih orang yang menurut saya layak untuk dipilih..”

Mereka merasa terpaksa menerima karena kondisi ekonomi yang sulit, namun tetap berharap bahwa politik bisa berjalan tanpa harus melibatkan uang. Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran di kalangan masyarakat tentang dampak negatif politik uang, tetapi keterbatasan ekonomi membuat mereka sulit untuk menolak tawaran tersebut (Fitriani dkk., 2019; Sugiarti, 2023; Wou, 2018).

Pandangan lain yang muncul dari FGD adalah bahwa politik uang tidak hanya berdampak negatif pada proses pemilihan itu sendiri, tetapi juga pada kinerja pejabat yang terpilih. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih fokus pada pengembalian modal kampanye mereka daripada menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Akibatnya, kebijakan publik sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu atau bahkan diri mereka sendiri, alih-alih memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.

Wawancara dengan politisi menunjukkan bahwa beberapa mengakui bahwa meskipun mereka sadar akan dampak negatif politik uang, mereka merasa tidak punya pilihan lain karena tekanan dari partai politik atau pendukung mereka. Mereka juga menyebutkan bahwa dalam banyak kasus, politik uang menjadi satu-satunya cara untuk bersaing secara efektif dalam pemilu, terutama ketika melawan

kandidat dengan sumber daya finansial yang lebih besar. Seorang politisi lokal yang duduk sebagai anggota DPRD salah satu kabupaten/kota di Sumatera Barat menyatakan, bahwa meskipun ia telah sering membuat kegiatan-kegiatan untuk masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyalurkan dana-dana pokok (pokok pikiran) untuk program-program kepada masyarakat tetapi justru pada pemilu terakhir (2014) mendapatkan suara yang lebih sedikit daripada yang ia peroleh pada pemilu sebelumnya (2019), meskipun tetap terpilih sebagai anggota DPRD, namun ia menyayangkan bahwa salah seorang kandidat lain, mendapatkan suara yang lebih besar daripada yang ia miliki, meskipun sepengetahuannya sedikit membuat program-program kepada masyarakat dan hanya berfokus untuk menyebarkan amplop berisi uang untuk mengajak untuk memilih kandidat tersebut (Lihat Gambar 2, dan Gambar 3).

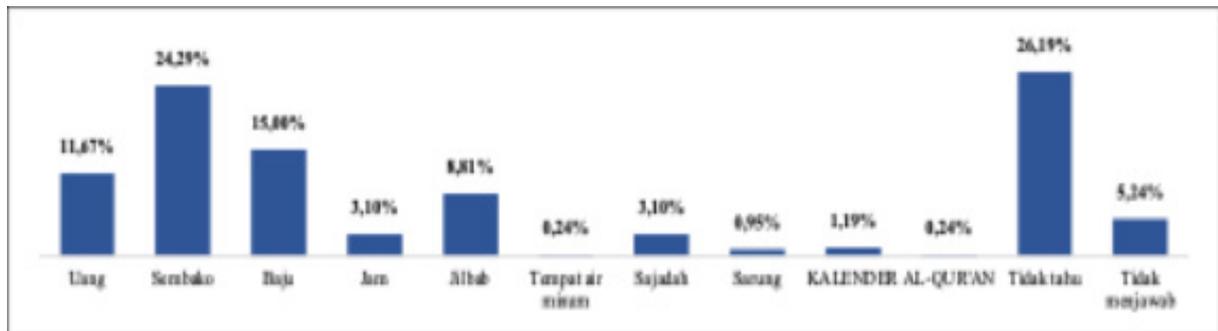
Seorang tim sukses dari seorang kandidat lain mengungkapkan bahwa dalam tujuan pragmatis, ternyata lebih efektif untuk melakukan politik uang daripada hanya mengandalkan program-program selama menjabat.

“..Meskipun sering tertipu pada suatu TPS, tetapi secara umum, lebih mudah membuat kalkulasi suara yang dihasilkan politik uang daripada program-program yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir.”

Sementara itu, R. mengungkapkan jumlah uang yang ada di amplop itu bisa mencapai satu juta rupiah, menurut pengakuannya dari pesan yang disampaikan oleh oknum yang memberikannya, jumlah ini adalah satu “paket”, yang berarti bahwa uang tersebut berupa ajakan memilih kandidat untuk DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

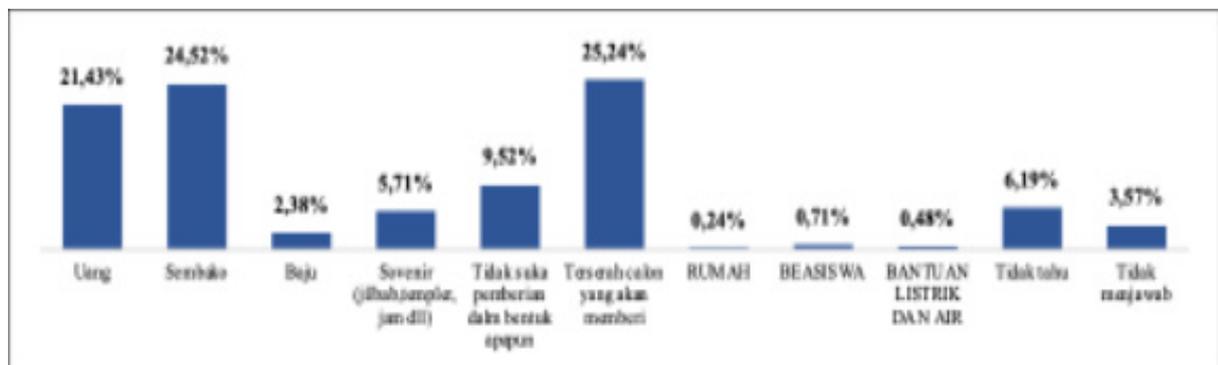
Data hasil survei, *Focus Group Discussions* (FGDs), dan wawancara mendalam

Gambar 2
Bentuk Sumbangan Yang Disukai



Sumber : Peneliti, 2024

Gambar 3
Bentuk Sumbangan Yang Sering Diberikan



Sumber: Laporan survei preferensi politik masyarakat Sumatera Barat Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Naskah tidak dipublikasikan)

dengan berbagai pemangku kepentingan di Sumatera Barat mengungkapkan bahwa politik uang masih merupakan faktor penting dalam dunia politik lokal. Mayoritas responden setuju bahwa uang memainkan peran utama dalam menentukan keberhasilan seseorang maju ke dunia politik. Pandangan ini bervariasi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, dan wilayah geografis, dengan responden yang lebih tua dan berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih skeptis dan kritis terhadap praktik ini. Meskipun nilai-nilai adat dan agama yang kuat di Sumatera Barat mengajarkan integritas dan kejujuran, tekanan ekonomi dan kebutuhan praktis membuat beberapa masyarakat mulai menunjukkan

toleransi terhadap politik uang. Praktik ini dianggap sebagai bagian dari permainan dalam persaingan politik yang ketat, namun diakui merusak moralitas politik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

PEMBAHASAN

Politik Uang Sebagai Bentuk Patronase

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori patronase dan klientalisme yang menyatakan bahwa politik uang merupakan salah satu bentuk dari patronase politik (Aspinall dan Berenschot, 2019; Aspinall dan Sukmajati, 2016). Praktik ini mencerminkan hubungan timbal balik antara politisi dan

pemilih, dimana politisi memberikan uang atau keuntungan lainnya sebagai imbalan atas dukungan politik. Di Sumatera Barat, politik uang tampaknya menjadi strategi yang umum digunakan dalam kontestasi politik, terutama dalam konteks persaingan yang ketat dan kebutuhan untuk memobilisasi dukungan dengan cepat (Aminah, 2016). Patronase politik, yang sering kali dijalankan melalui praktik politik uang, adalah bentuk relasi kekuasaan di mana seorang patron, biasanya seorang politisi atau pemimpin yang berpengaruh, menawarkan bantuan material atau ekonomi kepada kliennya (pemilih) sebagai imbalan atas dukungan politik. Sistem ini menciptakan ikatan yang kuat antara patron dan klien, namun sering kali merugikan proses demokrasi yang sehat dan transparan (Hicken, 2011).

Dalam konteks Sumatera Barat, politik uang sering kali digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan di daerah-daerah dengan persaingan politik yang ketat. Pemilih di wilayah ini cenderung menerima uang atau barang dari calon politisi sebagai bentuk kompensasi atas dukungan mereka. Praktik ini sering dianggap sebagai sesuatu yang normal dan bahkan diharapkan dalam setiap pemilihan. Menurut Buehler (2003), politik uang di Sumatera Barat tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga di tingkat provinsi, yang menunjukkan betapa mendalamnya praktik ini telah mengakar dalam budaya politik setempat.

Politik uang di Sumatera Barat tidak hanya terjadi dalam bentuk pemberian uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, seperti sembako, biaya pendidikan, atau perbaikan infrastruktur lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah bertransformasi dan menyesuaikan

diri dengan kebutuhan dan preferensi lokal, membuatnya semakin sulit untuk diberantas. Selain itu, praktik politik uang di Sumatera Barat sering didorong oleh tekanan ekonomi yang dihadapi oleh banyak pemilih. Dalam kondisi di mana akses terhadap sumber daya ekonomi terbatas, menerima uang atau barang dari politisi menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, politisi yang terlibat dalam praktik politik uang merasa terpaksa melakukannya untuk memenangkan suara dalam kontestasi yang ketat, di mana setiap suara sangat berharga (Aspinall dan Mietzner, 2010).

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu menunjukkan bahwa masyarakat tampaknya tidak lagi merasa malu-malu untuk menyampaikan apa bentuk sumbangan yang diinginkannya kepada kandidat. Berdasarkan survei yang kami lakukan hanya 6.19% yang menjawab tidak tahu dan 3.57% yang tidak menjawab. Padahal, beberapa tahun lalu ini merupakan suatu hal yang dianggap tabu karena dan sungkan untuk disampaikan kepada orang-orang yang tidak dikenal. Meskipun dalam diskusi-diskusi informal yang tidak terdokumentasikan, masyarakat bisa saja meminta sesuatu kepada kandidat ataupun tim sukses untuk sumbangan-sumbangan tertentu, tetapi sekali lagi menyampaikannya kepada orang asing (tenaga peneliti yang tidak mereka kenal dan bukan berasal dari lingkungan sekitar) tentang apa-apa saja yang mereka inginkan untuk diberi. Sementara berdasarkan jawaban dari responden, 21,43% mengaku pernah mendapatkan sumbangan uang, dan 24,52% mendapatkan sembako. Ini membentuk hampir dari setengah dari sampel pernah mendapatkan sumbangan yang bukan menjadi Alat Peraga Kampanye (APK) dan jelas-jelas dilarang oleh peraturan yang ada.

Namun, meskipun praktik politik uang tampaknya memberikan keuntungan jangka pendek bagi pemilih, dampak jangka panjangnya terhadap kualitas demokrasi sangat merugikan. Politik uang menciptakan siklus ketergantungan antara politisi dan pemilih, yang pada akhirnya melemahkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Kebijakan publik sering kali dibuat untuk menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan umum, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi (Schaffer, 2007).

Ketahanan Politik dan Dinamika Sosial

Berdasarkan kerangka teori ketahanan demokrasi yang dikemukakan oleh Diamond (1999), hasil penelitian ini menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi oleh sistem demokrasi di Sumatera Barat. Meskipun nilai-nilai adat dan agama yang kuat masih mendominasi masyarakat, perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang. Urbanisasi yang pesat, peningkatan akses informasi (Kato, 2005; Naim, 1971), dan perubahan dalam struktur ekonomi menciptakan lingkungan di mana praktik politik uang dapat berkembang dan menjadi semakin diterima.

Kemajuan teknologi dan peningkatan akses informasi memainkan peran yang signifikan dalam memperluas pengaruh politik uang, meskipun dengan cara yang ambivalen. Media sosial dan platform digital, misalnya, telah mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah komunikasi antara politisi dan pemilih. Namun, perkembangan ini juga membuka peluang baru bagi politisi untuk memanfaatkan teknologi dalam strategi politik uang mereka. Platform-platform ini memungkinkan politisi untuk menjangkau

khalayak yang lebih luas dengan lebih efisien dan efektif, mengedarkan informasi atau penawaran yang terkait dengan politik uang dengan cepat dan tepat sasaran.

Hutson dkk. (2018) mencatat bahwa teknologi baru dapat memperburuk ketimpangan informasi dengan menciptakan “kesenjangan digital,” dimana akses ke informasi dan kelebihan data tidak selalu diterjemahkan menjadi pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik. Dalam konteks politik uang, ini berarti bahwa meskipun masyarakat mungkin memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, mereka sering kali tetap terpengaruh oleh pesan-pesan yang dirancang untuk memperkuat praktik politik yang tidak etis. Media sosial dengan kemampuannya untuk menyebarkan pesan secara viral sering kali digunakan untuk mengedarkan informasi yang menyesatkan atau untuk membenarkan tindakan politik uang sebagai hal yang biasa dan dapat diterima.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan kampanye politik yang lebih terfokus dan personal. Dengan menggunakan data analitik dan algoritma, politisi dapat menargetkan pemilih dengan penawaran yang lebih spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka, yang meningkatkan kemungkinan bahwa penawaran tersebut akan diterima (Muttaqin dan SE, 2023). Hal ini menciptakan lingkungan di mana politik uang tidak hanya menjadi lebih terorganisir, tetapi juga lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Schaffer (2007) menunjukkan bahwa dalam konteks ini, politik uang dapat berkembang menjadi strategi yang lebih canggih dan terintegrasi, yang tidak hanya melibatkan transfer uang secara langsung tetapi juga penggunaan teknologi untuk membangun dukungan.

Meskipun akses informasi yang lebih luas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang, kenyataannya sering kali informasi ini digunakan untuk memperkuat praktik politik yang ada. Teknologi digital dapat menciptakan ilusi transparansi dan akuntabilitas tanpa benar-benar mengubah perilaku politik yang mendasarinya. bahwa platform digital meskipun dirancang untuk memperbaiki akses dan keterlibatan, sering kali tidak cukup untuk mengatasi masalah struktural yang mendalam dalam politik, termasuk praktik politik uang (Aprianto, 2024). Dengan demikian, meskipun kemajuan teknologi dan akses informasi memiliki potensi untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, mereka juga dapat memperburuk masalah politik uang jika tidak diimbangi dengan upaya yang lebih luas untuk memperbaiki struktur politik dan ekonomi yang mendasarinya.

Perubahan dalam struktur ekonomi juga berkontribusi pada penerimaan politik uang. Ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian finansial yang meningkat sering kali mendorong masyarakat untuk menerima tawaran politik uang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mencerminkan temuan Schaffer (2007) yang menunjukkan bahwa dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, politik uang sering dianggap sebagai bentuk dukungan material yang diperlukan untuk bertahan hidup.

Berlatar belakang dinamika sosial dan ekonomi ini, tantangan bagi ketahanan demokrasi di Sumatera Barat menjadi semakin kompleks. Meskipun masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai adat dan agama, perubahan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut tidak selalu sejalan dengan praktik politik yang berkembang. Oleh karena

itu, untuk menjaga ketahanan politik, perlu adanya strategi yang tidak hanya memperkuat pendidikan politik dan penegakan hukum, tetapi juga mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial yang mendasari penerimaan politik uang.

Perubahan ini mencerminkan konflik antara tradisi dan modernitas. Urbanisasi membawa masyarakat pedesaan ke dalam lingkungan kota yang lebih heterogen, dimana mereka terpapar pada berbagai pengaruh baru dan cara pandang yang berbeda. Akses informasi yang lebih luas, melalui media sosial dan internet, turut mempercepat transformasi budaya dan nilai-nilai politik. Perubahan struktur ekonomi, dari agraris ke industri dan jasa, juga mengubah prioritas dan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan politik mereka (Aspinall dan Sukmajati, 2016).

Sementara itu, nilai-nilai tradisional dan religius yang menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Barat sebenarnya mengajarkan penolakan terhadap segala bentuk korupsi dan ketidakadilan. Namun, dalam praktiknya, tekanan ekonomi dan ketidakstabilan politik sering membuat masyarakat lebih pragmatis dalam memilih pemimpin mereka. Ada kecenderungan di mana pemberian uang atau barang selama kampanye dianggap sebagai bentuk perhatian dari calon pemimpin, dan bukan sebagai bentuk suap (Törnquist, 2006). Hal ini diperparah oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang, sehingga menambah persepsi bahwa praktik tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari politik lokal.

Menurut Buehler (2003), meskipun ada peningkatan kesadaran tentang pentingnya integritas dalam politik, banyak masyarakat yang merasa terpaksa menerima politik uang

karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam konteks ini, praktik politik uang bukan hanya menjadi masalah moral, tetapi juga masalah struktural yang membutuhkan solusi komprehensif dari pemerintah dan masyarakat.

Nilai Yang Dipikirkan Versus Nilai Yang Dilaksanakan

Charles Morris mengidentifikasi dua jenis nilai: *conceived values* (nilai yang dipikirkan atau diyakini orang) dan *operative values* (nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku mereka). Dalam konteks penelitian ini di Sumatera Barat, terdapat penegasan penting tentang adanya diskrepansi antara nilai-nilai yang dipikirkan oleh masyarakat dan praktik nyata mereka. Sementara banyak responden secara eksplisit mengklaim menghargai nilai-nilai adat dan agama yang menentang politik uang—nilai-nilai yang diyakini mereka (*conceived values*)—perilaku mereka sering kali tidak selaras dengan nilai-nilai tersebut, yaitu nilai-nilai yang tercermin dalam tindakan mereka (*operative values*) (Petrilli, 2011; Zeman, 1981).

Banyak responden mengakui bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan agama mereka; namun, mereka mungkin masih menerima sogokan dari kandidat sebagai imbalan atas dukungan mereka. Proses ini menyoroti sesuatu yang bertolak belakang antara nilai-nilai yang dianut dan perilaku aktual dalam situasi sehari-hari. Perbedaan antara apa yang diklaim individu untuk dihargai dan tindakan mereka dalam praktik sering kali mencerminkan kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan (*das Sein dan das Sollen*). Pengalaman lapangan sering kali mengungkapkan ketegangan antara nilai-nilai masyarakat yang diterima secara luas dan nilai-nilai yang terwujud dalam praktik sosial.

Korupsi secara luas dipandang oleh masyarakat sebagai tindakan tidak etis yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Namun, dalam banyak konteks sosial, korupsi sering dianggap sebagai praktik yang biasa atau bahkan strategi yang diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Kesenjangan ini merupakan jurang antara idealisme dan kenyataan. Perbedaan antara apa yang ada dalam norma-norma moral dan sosial yang seharusnya terjadi dan apa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Situasi seperti itu tidak hanya menggarisbawahi kesenjangan antara nilai-nilai teoritis dan tindakan praktis, tetapi juga mengungkap ketergantungan sosial dan ekonomi yang memaksa individu untuk menerima perilaku yang menentang nilai-nilai luhur dalam upaya mereka untuk bertahan hidup atau maju di arena politik.

Kesenjangan ini menghadirkan dilema moral yang mendalam bagi individu yang terjebak antara menegakkan nilai-nilai yang mereka junjung tinggi dan menavigasi realitas sosial yang berlaku. Sering kali, orang merasa tertarik untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma praktis lingkungan mereka, bahkan ketika norma-norma ini berbenturan dengan keyakinan etis mereka. Meskipun mereka menentang keras politik uang, mereka mungkin akhirnya memilih untuk “mengikuti arus,” melihatnya sebagai jalan yang lebih pragmatis untuk mencapai aspirasi mereka, entah itu berarti mendapatkan akses ke kekuasaan, sumber daya, atau keuntungan pribadi lainnya.

Diskrepansi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan agama yang seharusnya menuntun perilaku politik sering hanya berfungsi sebagai norma simbolik atau “semboyan” yang tidak cukup mempengaruhi tindakan nyata. Ketika menghadapi situasi

yang melibatkan tekanan ekonomi atau kebutuhan mendesak, nilai-nilai yang dipikirkan sering digantikan oleh tindakan yang lebih pragmatis, seperti menerima uang dari politisi sebagai bentuk kompensasi atau dukungan. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dari salah seorang Narasumber ER. (34) dan bisa saja berlaku bagi banyak orang lainnya yang secara pragmatis menerima imbalan berupa materi dalam menentukan pilihannya.

Fenomena ini juga mencerminkan prinsip bahwa "*action speaks louder than words,*" di mana tindakan nyata individu lebih mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku mereka daripada pernyataan verbal mereka. Dalam konteks politik uang, meskipun masyarakat mengklaim menolak praktik tersebut berdasarkan nilai-nilai adat dan agama, kenyataannya sering kali menunjukkan bahwa mereka memilih untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan praktis mereka (Davidson dkk., 2010).

Konsekuensi dari perbedaan ini adalah bahwa meskipun nilai-nilai adat dan agama dianggap penting dalam masyarakat, mereka tidak selalu mengarahkan perilaku politik secara efektif. Ini menyoroti kebutuhan untuk memahami dinamika antara nilai-nilai yang dipikirkan dan praktik nyata dalam merancang kebijakan dan strategi untuk memperbaiki integritas politik. Upaya untuk mengatasi praktik politik uang harus memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dari nilai-nilai yang diyakini menuju perilaku nyata, termasuk tekanan ekonomi dan diferensiasi yang mungkin mempengaruhi keputusan individu.

Peran Nilai Adat Dan Agama

Nilai-nilai adat dan agama di Sumatera Barat, yang dirangkum dalam falsafah "*Adat*

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah," memegang peranan penting dalam membentuk struktur moral dan etika masyarakat (Abdullah, 1981; Hadler, 2010). Falsafah ini, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip adat dan ajaran agama, berguna untuk memperkuat ketahanan demokrasi dengan menyediakan landasan moral yang kuat yang menentang praktik politik uang. Dalam konteks penelitian ini, sejumlah informan kunci menekankan bahwa nilai-nilai ini dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi.

Para informan percaya bahwa pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama dapat memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya integritas dan transparansi dalam proses politik. Mereka menganggap bahwa pendekatan pendidikan yang berbasis pada falsafah "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" dapat membantu memperkuat komitmen masyarakat terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan mengurangi toleransi terhadap praktik politik uang.

Pendidikan politik yang mengintegrasikan nilai-nilai ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang teori demokrasi dan etika politik, tetapi juga bagaimana nilai-nilai lokal dapat diterjemahkan ke dalam praktik politik yang etis dan transparan (Amri dkk., 2016, 2019). Hal ini melibatkan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif politik uang serta pentingnya memilih kandidat berdasarkan kapasitas dan rekam jejaknya, bukan berdasarkan imbalan materi.

Selain itu, penekanan pada nilai-nilai adat dan agama dalam pendidikan politik dapat memperkuat norma-norma sosial yang mendukung integritas dan akuntabilitas dalam

politik. Menurut penelitian oleh Aspinal dan Sukmajati (2016), nilai-nilai tradisional sering kali memiliki kekuatan yang signifikan dalam membentuk perilaku politik di daerah-daerah tertentu. Dengan demikian, mengaitkan pendidikan politik dengan nilai-nilai adat dan agama dapat membantu membangun budaya politik yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap praktik-praktik yang merusak.

Integrasi nilai-nilai ini juga dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik dengan menciptakan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika (Misra dkk., 2021). Jika masyarakat merasa bahwa integritas demokrasi adalah bagian dari identitas budaya dan religius mereka, mereka lebih mungkin untuk menolak praktik politik uang dan berpartisipasi secara aktif dalam upaya untuk memperbaiki sistem politik.

Praktiknya, strategi ini perlu untuk melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, tokoh adat, dan organisasi agama untuk mengembangkan program-program yang mempromosikan pemahaman mendalam tentang etika politik dan tanggung jawab sosial. Upaya ini harus mencakup pendidikan tentang bagaimana politik uang merusak demokrasi dan bagaimana nilai-nilai adat dan agama dapat digunakan untuk memandu perilaku politik yang lebih etis. Dengan memperkuat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam proses demokrasi, Sumatera Barat dapat membangun ketahanan yang lebih kuat terhadap praktik politik uang. Hal ini akan berkontribusi pada penciptaan sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di daerah tersebut.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang signifikan dan perlu diperhatikan dengan serius.

Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan politik di Sumatera Barat. Upaya ini harus difokuskan pada penguatan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi serta peningkatan kesadaran akan bahaya politik uang yang dapat merusak integritas sistem demokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, program pendidikan politik yang dirancang harus mengintegrasikan nilai-nilai adat dan agama yang menjadi bagian penting dari kultur masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya ini, diharapkan program tersebut dapat lebih efektif dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat.

Kedua, institusi demokrasi yang ada perlu diperkuat secara struktural dan fungsional untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan integritas tinggi. Hal ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk meminimalkan peluang terjadinya praktik politik uang yang merugikan. Terakhir, sangat penting untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan mendalam dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, kita dapat memastikan bahwa mereka lebih terlibat dalam menjaga ketahanan demokrasi dan mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Sumatera Barat dapat berkontribusi secara positif dalam proses pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasar penjelasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, politik uang merupakan fenomena yang signifikan di Sumatera Barat dan dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan kandidat dalam pemilu. Meskipun mayoritas masyarakat menyadari bahwa politik uang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan agama, praktik ini tetap meluas karena tekanan persaingan politik dan kebutuhan untuk memobilisasi dukungan secara cepat.

Kedua, ditemukan adanya diskrepansi antara nilai-nilai yang dipikirkan (*conceived values*) dan nilai-nilai yang dilaksanakan (*operative values*) dalam masyarakat. Meskipun masyarakat Sumatera Barat menghargai nilai-nilai yang menentang politik uang, tindakan mereka sering kali tidak mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan agama terkadang hanya menjadi semboyan, dan perilaku nyata lebih mencerminkan realitas sosial dan politik.

Ketiga, dari sudut pandang teori patronase dan klienelisme, politik uang di Sumatera Barat mencerminkan hubungan timbal balik antara politisi dan pemilih. Praktik ini memperlihatkan bagaimana politik uang menjadi alat untuk memobilisasi dukungan politik dalam konteks persaingan yang ketat. Namun, dari perspektif ketahanan demokrasi, politik uang mengancam integritas demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Nilai-nilai adat dan agama di Sumatera Barat, yang dirangkum dalam falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, memiliki potensi untuk

memperkuat ketahanan demokrasi. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam pendidikan politik dan penguatan institusi demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., 1981. Islam, history and social change in Minangkabau, Dalam Lynn L. Thomas (Ed.). *Change and Continuity in Minangkabau: Local, Regional, and Historical Perspectives on West Sumatra*.
- Aminah, S., 2016. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Amir, M. S., 1997. *Adat Minangkabau: pola dan tujuan hidup orang Minang* (Nomor 38), Mutiara Sumber Widya.
- Amri, E., Putra, E.V., & Fernandes, R., 2016. Pola Hubungan Negara dan Civil Society Patterns State and Civil Society Relations. *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*.
- Anggraini, M., 2019. Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol. 13 No. 9*.
- Aprianto, M. T. P., 2024. Korupsi dan Budaya. *Korupsi dari Berbagai Perspektif No. 37*.
- Arief, U., 2010. Mencipakan Sistem Politik Berdasarkan Pancasila Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Nasional. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol. 3 No. 2*, 139–147.
- Aspinall, E., & Berenschot, W., 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., Mietzner, M., 2010. *Problems of democratisation in Indonesia: elections,*

- institutions and society*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M., 2016. *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B., 2021. Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia Vol. 4 No. 2*, 105–122.
- Buehler, M., 2003. Decentralisation and Local Democracy in Indonesia: The Marginalisation of the Public Sphere, Dalam *Problems of democratisation in Indonesia*. Flipside Digital Content Company Inc.
- Cochran, W. G., 1991. *Teknik penarikan sampel*. University Indonesia Press.
- Creswell, J., 2013. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Dalam *Research design*.
- Creswell, J. W., 2017. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Dalam *Journal of Social and Administrative Sciences*, <<https://doi.org/10.1453/jsas.v4i2.1313>>
- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S., 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Diamond, L., 1999. *Developing democracy: Toward consolidation*. JHU press.
- Djamaris, E., 2004. *Kaba Minangkabau: Ringkasan Isi Cerita serta Deskripsi Tema dan Amanat*. Pusat Bahasa.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L.W., & Chaniago, D.S., 2019. Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual Vol. 1 No. 1*, 53–61.
- Fuad, Z. M., 2015. Peran pemuda melawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dan implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah (studi pada relawan demokrasi Banyumas, Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional Vol. 21 No. 1*, 23–33.
- Geys, B., 2006. Explaining voter turnout: A review of aggregate-level research. *Electoral Studies*, <<https://doi.org/10.1016/j.electstud.2005.09.002>>
- Hadler, J., 2010. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama dan Kolonialisasi di Minangkabau*. Freedom Institute.
- Hamson, Z., 2021. Politik Uang di Pemilu Indonesia: Sebuah Tinjauan. *Journal of Communication Sciences (JCoS) Vol. 4 No. 1*.
- Hicken, A., 2011. Clientelism, *Annual review of political science*, Vol. 14 No. 1, 289–310, <<https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508>>
- Hutson, J. A., Taft, J.G., Barocas, S., & Levy, K., 2018. Debiasing desire: Addressing bias & discrimination on intimate platforms, *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction Vol. 2 (CSCW)*, 1–18.
- Kato, T., 2005. Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah, translated by Gusti Asnan dan Akiko Iwata. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Kompas, 2024. *Dikalahkan Anies, Prabowo Ditinggal Pilihannya di Sumbar*. 18 Februari 2024.
- Laporan survei preferensi politik masyarakat Sumatera Barat Menjelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 (Naskah tidak dipublikasikan)

- Madjoindo, A. Dt. B. A. Dt., 1956. *Tambo Alam Minangkabau*. Balai Pustaka.
- McNabb, D. E., 2020. *Research methods for political science: quantitative, qualitative and mixed method approaches*. Routledge.
- Mietzner, M., 2015. *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. JSTOR.
- Misra, F., Sudarmoko, S., Apriwan, A., Hakim, A., Kabullah, M.I., & Rahman, F., 2021. Kontekstualisasi Pilkada Riau: Sosiokultural, Relasi Klientalistik dan Indikasi Politik Uang. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 7 No. 1*, 43–56.
- Muhtadi, B., 2013. Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara party-id dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 10 No. 1*, 41–58.
- Muhtadi, B., 2019. Politik uang dan new normal dalam pemilu pasca-orde baru. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1*, 55–74.
- Muhtadi, B., Gautama, C., Putro, G.A., Rofiqi, Z., 2020a. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*.
- Muhtadi, B., Gautama, C., Putro, G.A., Rofiqi, Z., 2020b. *Kuasa Uang: Politik Uang Dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*.
- Muttaqin, H. F., & SE, M. S. M., 2023. *Turbulensi Marketing*. Penerbit Berseri.
- Naim, M., 1971. *Merantau: Causes and Effects of Minangkabau*. ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore.
- Petrilli, S., 2011. Charles Morris. *Philosophical perspectives for Pragmatics*. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins. 180–201.
- Reeve, D., 2013. Golkar: Sejarah Yang Hilang, Dalam *Pemikiran, Dinamika*, Komunitas Bamabu.
- Ricklefs, M. C., 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi.
- Robinson, J. A., & Verdier, T., 2013 The Political Economy of Clientelism. *Scandinavian Journal of Economics Vol. 115 No. 2*, 260–291, <<https://doi.org/10.1111/j.1467-9442.2013.12010.x>>
- Schaffer, F. C., 2007. *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Lynne Rienner Publishers.
- Sjafrina, A. G. P., 2019. Dampak politik uang terhadap mahalnya biaya pemenangan pemilu dan korupsi politik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi Vol. 5 No. 1*, 43–53.
- Sugiarti, T., 2023. *Money Politic: Tinjauan berdasarkan partisipasi politik dan Keputusan Memilih Masyarakat*. Penerbit P4I.
- Sugiharto, I., 2021. *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Penerbit Nem.
- Sumargo, B., 2020. *Teknik sampling*. UNJ press.
- Törnquist, O., 2006. Assessing democracy from below: a framework and Indonesian pilot study, *Democratization Vol. 13 No. 02*, 227–255.
- Ufen, A., 2006. *Political parties in post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and 'Philippinisation'*.
- Widiastanto, A., Sukarna, K., Hidayat, A., dan Sadono, B., 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1*, 444–457.
- Wou, A., 2018. Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang (Money Politic) Dalam Setiap Pesta Demokrasi Di Kampung Soryar Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak Vol. 13 No. 1*, 8–14.

Zeman, J. J., 1981. Charles W. Morris (1901-1979). *Transactions of the Charles S. Peirce Society* 17 (1), 3–24.

Internet:

<https://cekdptonline.kpu.go.id>.

Wawancara:

1. M, 24 tahun
2. HI, 49 tahun
3. R, 43 tahun
4. ER, 34 tahun